

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMENUHAN KETENTUAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
TRANSFORMASI BADAN KREDIT DESA YANG DIBERIKAN STATUS SEBAGAI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

Lampiran III.1

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Permohonan Penyatuan BKD Melalui Proses Penggabungan

Menunjuk Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan atas Penyatuan BKD melalui proses penggabungan BPR milik Pemerintah Daerah dan sekaligus mencabut izin usaha BKD sebagai berikut:

No	Nama BKD	No. Izin Usaha dari Menkeu	Alamat	Waktu Operasional	No. Telepon	Email
1						
2						
3	Dst.					

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Ketua Pelaksana Operasional BKD

Direksi BPR milik Pemerintah Daerah

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ^{*)} Pengajuan permohonan penggabungan BKD dapat digabungkan dalam satu surat dengan pengajuan permohonan yang lain.

CHECKLIST ...

CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYATUAN BADAN KREDIT DESA MELALUI PROSES PENGGABUNGAN

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1	Rancangan Penggabungan BKD sesuai dengan butir III.A.1.k.1) SEOJK tentang BKD.		
2	Persetujuan para pemilik BKD yang melakukan Penggabungan BKD.		
3	Rancangan Neraca dan Laporan Laba/Rugi hasil Penggabungan BKD dengan BPR milik pemerintah daerah.		
4	Akta Penggabungan dan Akta Pendirian BPR hasil Penggabungan BKD.		
5	Bukti pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan BKD.		

Demikian *checklist* ini disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan penyatuan Badan Kredit Desa melalui proses penggabungan.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

Ketua Pelaksana Operasional BKD

Direksi BPR milik Pemerintah Daerah

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Operasional BKD dan Direksi BPR milik Pemerintah Daerah.

Lampiran III.2

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Permohonan Penyatuan BKD Melalui Proses Peleburan

Menunjuk Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan atas penyatuan BKD melalui proses peleburan dan sekaligus mencabut izin usaha BKD sebagai berikut:

No	Nama BKD	No. Izin Usaha dari Menkeu	Alamat	Waktu Operasional	No. Telepon	Email
1						
2						
3	Dst					

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian permohonan kami.

Ketua Pelaksana Operasional BKD

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ^{*)} Pengajuan permohonan peleburan BKD dapat digabungkan dalam satu surat dengan pengajuan permohonan yang lain

CHECKLIST ...

CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYATUAN BADAN KREDIT DESA MELALUI PROSES PELEBURAN

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1	Rancangan Peleburan BKD sesuai dengan butir III.A.2.k.1) SEOJK tentang BKD.		
2	Persetujuan para pemilik BKD yang melakukan Peleburan BKD.		
3	Rancangan neraca dan laporan laba rugi BPR hasil Peleburan BKD.		
4	Akta Peleburan dan Akta Pendirian BPR hasil Peleburan BKD.		
5	Bukti pengumuman ringkasan rancangan Peleburan BKD.		

Demikian *checklist* ini disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan penyatuan Badan Kredit Desa melalui proses peleburan.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Operasional BKD.

Lampiran III.3

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Laporan Pelaksanaan Penyatuan BKD

Menunjuk Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami laporkan bahwa proses penyatuan BKD melalui proses penggabungan/peleburan²⁾ telah kami laksanakan pada tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Fotokopi anggaran dasar atau akta pendirian BPR hasil Penyatuan BKD yang telah disetujui atau disahkan oleh instansi yang berwenang.
2. Susunan organisasi dan kepengurusan BPR hasil Penyatuan BKD, data Direksi dan Dewan Komisaris serta data pemegang saham atau pemilik BPR hasil Penyatuan BKD;
3. Laporan Neraca dan Laba/Rugi BPR hasil Penyatuan BKD; dan
4. Alamat lengkap BPR hasil Penyatuan BKD.

Demikian agar maklum.

Direksi BPR BKD

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ²⁾ Coret yang tidak perlu.

Lampiran III.4

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Permohonan Persetujuan atas Rencana Pengalihan BKD

Menunjuk Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status sebagai Bank Perkreditan Rakyat, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan atas rencana Pengalihan BKD dan sekaligus mencabut izin usaha BKD sebagai berikut:

No	Nama BKD	No. Izin Usaha dari Menkeu	Alamat	Wilayah Usaha	No. Telepon	Email
1						
2						
3	Dst					

Pengalihan BKD di atas dilakukan oleh:

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*)	
Alamat	
No. Telp	
Email	

Selanjutnya, kami berencana akan mendirikan BPR dengan nama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota

Untuk melengkapi permohonan persetujuan atas rencana pengalihan, dengan ini terlampir kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai butir III.B.2 SEOJK tentang BKD dan disertai dengan *checklist* kelengkapan dokumen.

Demikian permohonan kami.

Pemerintah Daerah

Keterangan:

- ¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BKD bersangkutan.
- ^{*)} Pengajuan permohonan rencana pengalihan BKD dapat digabungkan dalam satu surat dengan pengajuan permohonan yang lain

CHECKLIST ...

**CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN
BADAN KREDIT DESA**

No.	Dokumen	Check	Keterangan
1.	Rancangan Pengalihan BKD memuat paling sedikit:		
	a. nama dan tempat kedudukan Pemerintah Daerah yang akan mengambilalih BKD;		
	b. nama dan tempat kedudukan BKD yang akan diambilalih;		
	c. jumlah dan nilai nominal aset dan kewajiban yang akan diambilalih beserta komposisi pemegang saham atau pemilik setelah dilakukan Pengalihan BKD; dan		
	d. rencana status kantor BKD hasil Pengalihan BKD.		
2	Persetujuan para pemilik BKD yang melakukan Pengalihan BKD.		
3	Rancangan Neraca dan Laporan Laba/Rugi setelah Pengalihan BKD.		
4	Rancangan pengumuman Pengalihan BKD.		

Demikian *checklist* ini disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan rencana pengalihan Badan Kredit Desa.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Lampiran III.5

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :
Lamp :

Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
U.p.¹⁾

Perihal: Permohonan Izin Usaha BPR Hasil Pengalihan BKD

Menunjuk Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor tanggal
perihal dengan ini kami:

Nama BPR :

Alamat :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagai Bank
Perkreditan Rakyat.

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan ini terlampir kami
sampaikan dokumen pendukung¹⁾ yang disertai dengan *checklist* kelengkapan
dokumen.

Demikian permohonan kami.

Pemerintah Daerah

Keterangan:

¹⁾ Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR BKD
bersangkutan.

²⁾ Dalam 2 (dua) rangkap.

CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT HASIL PENGALIHAN BADAN KREDIT DESA

No	Dokumen	Check	Keterangan
1	Bukti pemenuhan modal inti minimum;		
2	Akta pendirian badan hukum yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;		
3	Peraturan Daerah mengenai pendirian BPR;		
4	Bukti kesiapan operasional;		
5	Data kepemilikan berupa daftar saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, kecuali bagi BPR yang berbadan hukum Perusahaan Umum Daerah;		
6	Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;		
7	Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia; dan		
8	Surat keputusan Kepala Daerah yang menyatakan bahwa sumber dana setoran modal telah dianggarkan dalam APBD dan telah disahkan oleh DPRD setempat.		

Demikian *checklist* ini disusun secara lengkap dan benar untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat hasil Pengalihan Badan Kredit Desa.

(Tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Ttd¹⁾

(.....)

Keterangan:

¹⁾ Ditandatangani oleh pejabat Pemerintah Daerah.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Yuliana